



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Senin, 8 September 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						
FORMULIR BERITA				Register No :		
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI : MENTERI DALAM NEGERI UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI						
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 500.2.3/4891/SJ DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PENGUMUMAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT PROVS KMA KABS KMA KOTS KMA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KMA PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 8 SEPTEMBER 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH SERTA OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TTK KMA CC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA PROV KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA KAB GARING KOTA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG PERTUMBUHAN EKONOMI KMA KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI DRESS CODE PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA DD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA EE TTK DUM TTK HBS TANGGAL PEMBUATAN 5 September 2025						
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL		No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama : 	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal <u>Tomsy Tohir</u>		Terima	Kirim		
Tanda Tangan						



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi via zoom

Hari/Tanggal : Senin / 8 Sept 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	SRI LAILANA	Agristan 2	P	1
2	Agus Muslim	BPS Kota BJB	L	2
3	FAD LURRAHMAN	bag Eto & WDA		3
4	Ruriani	Ad bang		4
5	Isti	Eko SDA		5
6	Juniatur	DIDAGARIN		6
7	Arif R.H	BPKAD	L	7
8	KRISMAN	Diskominpo		8
9	FITRYADI	DIBOS Pa-	L	9
10	Resita	Bappenda		10
11	Pahmahina	DKP.3.		11
12	Mina	Eko + SDA		12
13	Erady	Eto & SDA.		13
14	Diah Ayu S.	Inspettorat		14
15	Indra	Berekonomian		15
16	RISP A	Umur		16
17	Mawardi	4		17
18	Syaminat	4		18
19	Aldien Sympu.	---		19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/4891/SJ Tanggal 5 September 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat :

Senin, 8 September 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Realisasi penyaluran SPHP beras Periode 1 Januari s.d terkini 7 September 2025 329.946 ton atau sebesar 22% dari target.
 - b) Rekomendasi tindak lanjut:
 - Agar perum bulog mensosialisasikan dan melatih para pedagang beras di pasar tradisional bisa menggunakan aplikasi Klik SPHP
 - Pengawasan bersama pemda dan satgas pangan POLRI
 - Publikasi penyaluran SPHP beras kepada publik secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui semua
 - Mengoptimalkan sarana penyaluran SPHP beras
 - c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
 - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,95 juta ton setara beras
 - Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 3 September 2025 sebanyak 3,95 juta ton)
 - Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 329,9 ribu ton) dari alokasi 1,5 juta ton
 - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (realisasi selama 2 bulan Juni-Juli sebanyak 362,5 ribu ton atau 99,17%)
 - Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 7.858 kali di 461 kab/kota dan 36 provinsi.
 - Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.053 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
 - Kios pangan sebanyak 1.467 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 120 kab/kota.
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
 - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
 - B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
 - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi.

2. BADAN PUSAT STATISTIK

- a) Secara historis dari 2022-2025, inflasi Agustus relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Juli, kecuali pada tahun 2024. Pada periode tersebut selalu terjadi deflasi di bulan Agustus.
- b) Deflasi Agustus dominan disebabkan oleh deflasi komponen harga bergejolak.
- c) Deflasi pada Agustus 2025 utamanya disebabkan oleh komponen harga bergejolak, dengan deflasi sebesar 0,61% dan andil deflasi sebesar 0,10%. Beberapa komoditas komponen harga bergejolak yang memberikan andil deflasi antara lain tomat, cabai rawit, bawang putih dan telur ayam ras.
- d) Pada M1 September 2025, tercatat 7 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 30 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 7 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah dan cabai rawit.
- e) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M1 September 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH.

3. BULOG

- a) Realisasi pengadaan GKP sebesar 4,22 juta ton GKP dan realisasi beras sebesar 729 ribu ton, jadi total pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 2.985.553 ton.
- b) Program SPHP dilaksanakan kembali mulai bulan Juli hingga Desember 2025 dengan total pagu sebesar 1,5 juta ton. Rata-rata penyaluran SPHP per hadri mencapai 2.000 s.d 9.000 ton
- c) Pemerintah melalui Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, Pemerintah Daerah serta sejumlah BUMN pangan bersinergi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia dengan menyalurkan lebih dari 20 ribu ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
- d) Realisasi distribusi minyakita per tanggal 3 September 2025 sebanyak 62.568.735 liter dengan distribusi tertinggi pada bulan Maret 2025 sebanyak 10.684.563 liter yang bertepatan pada momen Ramadhan.

4. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Inflasi yang tinggi berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat miskin sehingga pengendalian inflasi merupakan bagian penting dan strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b) Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perlu berbasis data yang akurat, akuntabel dan transparan, serta harus disertai langkah pencegahan penyimpangan hukum agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
- c) Program percepatan pembangunan 3 (tiga) juta rumah merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menjaga stabilitas ekonomi.
- d) Rekomendasi dari Jamdatun terhadap Pemerintah Daerah:
 - Kejaksan siap memberikan pendampingan hukum, legal review dan deteksi dini melalui intelijen penegakan hukum untuk memastikan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

program pengendalian inflasi dan penghapusan kemiskinan eskترم berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.

- Pemerintah Daerah perlu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM, koperasi dan usaha lokal dengan dukungan regulasi yang adil guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- Dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan tetapi juga penting memperhatikan kepastian hukum, transparansi pemanfaatan aset, pencegahan penyimpangan anggaran serta perlindungan konsumen dan MBR.

5. KEMENTRIAN PERDAGANGAN

- Berdasarkan data SP2KP per 4 September 2025, secara nasional harga beras medium dan premium mulai mengalami penurunan. Namun, masih terdapat daerah yang tercatat berada di atas HET medium (26 provinsi) dan di atas HET premium (34 provinsi).
- Realisasi DMO bulan Agustus sebesar 188.456 ton dan per 7 September sudah terealisasi 15.484 seluruhnya dalam bentuk Minyakita.
- Peningkatan DMO bulan Juli disebabkan oleh tren ekspor yang meningkat.
- Ketersediaan minyak goreng second brand dan kemasan premium mencukupi.
- Produsen minyak goreng memastikan pendistribusian secara efisien dan efektif dengan turut memantau jaringan distribusi seperti D1 dan D2 yang ditunjuk, serta menghilangkan eksistensi sales-middleman dalam pendistribusian DMO, serta tidak melakukan praktik bundling yang memengaruhi harga jual akhir minyakita menjadi lebih tinggi

6. KANTOR STAF PRESIDEN

- Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 4 September 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	-	Daging Sapi, Kedelai	Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting
	Waspada	-	Gula Pasir Curah	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras
	Tidak Aman	-	-	Beras Medium (Zona 3), Bawang Merah, Bawang Putih, Minyakita, Jagung Tk Peternak

- Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 4 September 2025)

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	8	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Intan Jaya	7	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Pegunungan Bintang	6	Bawang Merah, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mappi	6	Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Lanny Jaya	4	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Dogiyai	3	Bawang Putih, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah
Kab. Mamberamo Raya	3	Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Boven Digoel	3	Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras
Kab. Paniai	3	Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Merauke	3	Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Teluk Bintuni	2	Bawang Merah, Bawang Putih
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Deiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Mahakam Ulu	2	Beras Medium, Daging Ayam Ras
Kab. Asmat	2	Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah
Kab. Kepulauan Tanimbar	2	Cabai Rawit Merah, Jagung Tk Peternak
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Waropen	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Manokwari	2	Minyakita, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Sorong	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Kanmun	2	Jagung Tk Peternak, Daging Sapi

7. KEMENTRIAN DALAM NEGERI

- Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No.000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 Hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, maka Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta untuk:
 - Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang terdiri dari: Sekretaris Daerah sebagai ketua tim, Kepala Bappeda sebagai sekretaris, serta anggota yang terdiri dari unsur perangkat daerah unsur kejaksaan, kepolisian. TNI, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
 - Melaksanakan 9 langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui website kendaliekonomi.kemendagri.go.id paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
 - Mengalokasikan belanja daerah yang bersumber dari APBD pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung pemantauan, pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Berkoordinasi dengan BPS setempat untuk mengetahui perkembangan data pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
 - Kemendagri akan melakukan rapat koordinasi evaluasi atas capaian percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada minggu ke-4 setiap bulannya.
- Poin arahan Mendagri pada Rakor melalui zoom meeting bersama seluruh kepala daerah terkait perkembangan situasi Kamtibmas:
 - Agar Kepala Daerah melaksanakan Rapat Forkopimda;
 - Sambangi/duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh;
 - Laksanakan Doa Kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan Pemerintah;
 - Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, bansos, dll;
 - Tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik-musik seperti berpesta;
 - Jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dll, laksanakan secara sederhana;
 - Tunda semua keberangkatan ke luar negeri;
 - Semua Kepala Daerah dalam kondisi rawan harus di dalam daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkompimda.
 - Rekonstruksi/perbaiki fasilitas yang rusak secepat mungkin. Kalau yang perlu waktu lama perbaikan agar areanya ditutup. Agar fasilitas

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

untuk layanan publik pulih dan menghindari trauma publik

- Gunakan bahasa santun low profile dan menenangkan saat membuat pernyataan ke publik
- Aktifkan Siskamling RW/RT untuk jaga lingkungan masing-masing.

8. KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

- a) Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 23,85 juta orang (8,47%) dan ditargetkan akan mencapai 5% pada tahun 2029.
- b) Kemiskinan harus turun sebesar 0,86% pertahun untuk mencapai target 5% pada tahun 2029.
- c) Provinsi Kalimantan Selatan termasuk ke dalam salah satu provinsi dengan tingkat inflasi & garis kemiskinan tertinggi. Sehingga mengendalikan inflasi adalah salah satu kunci keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.
- d) Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama pusat dan daerah serta termasuk urusan wajib pelayanan kebutuhan dasar sosial sesuai PP nomor 2 tahun 2018.

9. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a) Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR). KEMENDAGRI dan KEMENPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.
- b) Pemerintah daerah wajib ikut serta menyelesaikan program 3 juta rumah sebagai PSN (Pasal 67 UU No.23 tahun 2014).
- c) Bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan, akan menerima sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali hingga penonaktifan sementara hingga pemberhentian kepala daerah. (Pasal 68 UU No.23 Tahun 2014)
- d) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
- e) Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
- f) Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
- g) Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
- h) Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
- i) Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

10. TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Agustus 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- d) TNI sudah bangun 55 BTP dan kompi produksi
- e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk monitor serta bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-1 September 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar -0,30 (deflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Merah (-0,5923), Cabai Rawit (-0,1123), dan Ikan Kembung (-0,0668). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (8 September 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru